

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia berada di kawasan yang disebut cincin api, kondisi tersebut akan menyebabkan bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir dan longsor sangat tinggi. Bencana alam ini telah menimbulkan ribuan korban jiwa, kerugian materil dan meninggalkan banyak orang untuk berjuang membangun kembali tempat tinggal dan mata pencahariannya.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) dalam Bab I Pasal 1, mengelompokkan bencana ke dalam bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang mengakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar

komunitas, dan teror. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 menegaskan, yang dimaksud dengan ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. BNPB sebagai badan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana mengidentifikasi jenis ancaman bencana sebagai berikut: (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) letusan gunung api; (4) banjir; (5) tanah longsor/gerakan tanah; (6) kebakaran hutan dan lahan; (7) kekeringan; (8) gelombang ekstrem; (9) cuaca ekstrem (angin puting beliung, topan, dan badai tropis); (10) erosi; (11) abrasi; (12) epidemi dan wabah penyakit; (13) kebakaran hutan; (14) kegagalan teknologi; dan (15) konflik sosial.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia dilanda berbagai bencana baik skala besar maupun skala kecil. BNPB mendokumentasikan berbagai jenis bencana yang melanda Indonesia, yaitu aksi teror/sabotase, angin topan, banjir, tanah longsor karena banjir, epidemik, gelombang pasang/abrasi, gempa bumi, hama tanaman, kebakaran hutan, kegagalan teknologi, kekeringan, konflik sosial, letusan gunung api, dan tanah longsor.

Sementara itu, jenis bencana skala besar yang terjadi dalam lima tahun terakhir di Indonesia adalah:

- (1). Gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada Desember 2004 yang menelan korban 165.708 jiwa dan kerugian harta benda Rp 4,45 triliun;
- (2). Gempa bumi yang menerjang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006 yang menelan korban 5.667 jiwa dan rumah rusak 156.662 buah, dengan kerugian harta benda Rp 3,134 triliun;
- (3). Gempa dan tsunami di Pangandaran yang terjadi Juli 2006 menelan korban 658 jiwa dan kerugian harta benda Rp 137,8 miliar;
- (4). Bencana Banjir Jakarta pada Februari 2007 yang menggenangi 145.774 rumah dan mengakibatkan kerugian Rp 967 miliar.

Kesiapsiagaan merupakan hal yang sangat penting dan harus dibangun pada setiap tingkat kelompok di masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa kehancuran akibat bencana dapat secara drastis dikurangi jika semua orang lebih siap menghadapi bencana. Sekolah adalah pusat pendidikan yang tidak hanya memberikan kita ilmu pengetahuan tetapi juga bekal untuk kelangsungan hidup kita, kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian dari keterampilan untuk kelangsungan hidup kita. Sekolah juga seringkali menjadi tempat penghubung dan tempat belajar bagi seluruh masyarakat. Anak-anak merupakan peserta ajar yang paling cepat dan mereka tidak hanya mampu memadukan pengetahuan baru ke dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

menjadi sumber pengetahuan bagi keluarga dan masyarakatnya dalam hal perilaku yang sehat dan aman, yang mereka dapatkan di sekolah. oleh karenanya, menjadikan pencegahan bencana menjadi salah satu fokus di sekolah dengan memberdayakan anak-anak dan remaja untuk memahami tanda-tanda peringatan bencana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan mencegah bencana, merupakan suatu langkah awal yang penting dalam membangun ketangguhan bencana seluruh masyarakat. Jadi kesiapsiagaan haruslah menjadi bagian dari materi yang diberikan dalam dunia pendidikan.

Pengurangan Resiko Bencana (PRB) harus disosialisasikan pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Untuk itulah upaya pemerintah untuk melakukan PRB sudah diperkuat dengan dikeluarkan Undang-Undang tentang penanggulangan bencana, namun demikian belum secara optimal dipahami oleh masyarakat. UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa kerugian harta benda, dan dampak manusia untuk mengatasi masalah bencana belum banyak dilakukan secara sistematis dan *suistenable* sehingga korban bencana masih menunjukkan angka-angka yang relatif tinggi.

Dalam konteks inilah, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) merupakan suatu tindakan yang harus dirancang secara terpadu dan terencana. Hal ini didukung oleh kondisi Indonesia yang memiliki kerentanan bencana. Indonesia berada pada urutan ke 7 sebagai negara yang mengalami bencana alam tahun 2005 berdasarkan International Strategy for Disaster Reduction 2006-2009, World Disaster, khusus Indonesia gambaran tentang bencana alam yang terjadi 2004-2007, Irene (2010:31).

Penanganan terhadap risiko bencana belum dilakukan secara optimal. Artinya bahwa Indonesia sebagai daerah rawan bencana masih memiliki tiga masalah utama:

- 1) Masih rendahnya kinerja penanganan bencana;
- 2) Masih rendahnya perhatian perlunya pengurangan resiko bencana;
- 3) Masih lemahnya peran sekolah dalam pendidikan mitigasi bencana.

Realitas diatas menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk secara serius mampu merancang risiko penanganan bencana secara kreatif dan proaktif. Untuk mendesain program-program penanganan bencana diperlukan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia.

Salah satu upaya mitigasi yang paling strategis adalah pembelajaran atau pendidikan kepada siswa. Pendidikan merupakan wahana yang efektif untuk membangun perilaku siswa dalam menghadapi bencana. Dengan mempunyai pengetahuan, pemahaman, kesiapsiagaan

keterampilan untuk mencegah, mendeteksi dan mengantisipasi secara lebih dini tentang berbagai macam bencana atau lebih dikenal dengan istilah mitigasi bencana yang meliputi aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang dapat diawali dari persiapan sebelum bencana itu berlangsung, menilai bahaya bencana, penanggulangan bencana, berupa penyelamatan, rehabilitasi dan relokasi. Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan berperilaku dalam mencegah, mendeteksi, mengantisipasi bencana secara efektif dapat diinformasikan, disosialisasikan melalui pendidikan di sekolah kepada siswa. Pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas sekolah, khususnya siswa akan mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana.

Dari pemaparan diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana kesiapsiagaan bencana dalam komunitas sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan dan sikap komunitas sekolah mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi?
2. Bagaimana kebijakan dari komunitas sekolah mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi?

3. Bagaimana rencana tanggap darurat komunitas sekolah mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi?
4. Bagaimana sistim peringatan dini komunitas sekolah mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi?
5. Bagaimana mobilisasi sumber daya komunitas sekolah mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi pengetahuan dan sikap komunitas sekolah dalam kesiapsiagaan bencana gempa bumi.
2. Mengidentifikasi sejauhmana kebijakan komunitas sekolah dalam kesiapsiagaan bencana gempa bumi.
3. Mengidentifikasi rencana tanggap darurat komunitas sekolah dalam kesiapsiagaan bencana gempa bumi.
4. Mengidentifikasi sistim peringatan dini komunitas sekolah dalam kesiapsiagaan bencana gempa bumi.
5. Mengidentifikasi mobilisasi sumber daya komunitas sekolah dalam kesiapsiagaan bencana gempa bumi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi sekolah sebagai bahan acuan untuk memberika kebijakan dan panduan dalam kesiapsiagaan bencana.
2. Bagi guru sebagai acuan untuk memasukan materi kesiapsiagaan bencana pada kegiatan pembelajaran di kelas.
3. Bagi siswa sebagai sarana menambah pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana.
4. Bagi penulis sebagai sarana menambah wawasan dan pemahaman terutama dalam kesiapsiagaan bencana dan pendidikan mitigasi bencana.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini maka peneliti akan memberikan penjelasan tentang konsep yang terdapat di dalam penelitian sebagai berikut :

1. Komunitas Sekolah

Komunitas sekolah adalah satu dari tiga *stakeholders* utama dalam kajian kesiap-siagaan komunitas menghadapi bencana. Menurut Widyatun dkk (2008:97) yang dimaksudkan dengan komunitas sekolah terdiri dari tiga unsur, yaitu : sekolah (kepala sekolah, tenaga administrasi), guru, dan siswa. Peran-peran dalam komunitas ini adalah penyiapan rencana

penyelamatan, penyebarluasan peringatan bencana, serta dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan mengantisipasi bencana alam.

2. Kesiapsiagaan bencana

Kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi-organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil (LIPI-UNESCO/ISDR:5). Dalam penelitian ini peneliti mengambil masalah kesiapsiagaan komunitas sekolah dalam mengantisipasi bencana alam gempa bumi.

3. Pengetahuan dan Sikap

Dalam Juariah (2006:54) pengetahuan adalah segala informasi yang mampu diterima dan disimpan dalam fikiran manusia yang dapat diungkapkan kapan saja dalam bentuk pengungkapan kata-kata maupun tulisan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan dalam kamus Besar bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Kamus bahasa Indonesia (Sinar Harapan) mengemukakan bahwa : pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui karena mempelajarinya; dan yang diketahui karena mengalami, melihat dan mendengar. Jadi jelas

bahwa pengetahuan berkaitan dengan proses belajar, pengalaman langsung atau tak langsung melalui pengamatan, pendengaran, penglihatan.

Sikap adalah reaksi atau respons seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut Krech dalam Juariah (2006:61) sikap adalah : *“an enduring of positive or negative evaluations, emotional feelings, and pro or conaction tendencies will respect to social object”*. Senada dengan pendapat tadi cambell dalm Juariah (2006:61) mengemukakan bahwa sikap adalah :” *an individual’s social attitude is an syndrome or response consistency with regard to social object”*.

Pengukuran sikap, dapat dilakukan dengan cara pengungkapan atau pengukuran sikap seseorang. Sikap meupakan respon evaluative yang berupa respon positif maupun respon negatif hal ini berarti adanya preferensi atau rasa suka dan tidak suka terhadap sesuatu sebagai objek sikap.

Pengetahuan dan sikap merupakan factor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki biasanya mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di tempat yang rentan dengan bencana.

4. Kebijakan

Merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan-kebijakan dituangkan dalam berbagai bentuk, tetapi

akan lebih bermakna apabila dicantumkan secara konkrit dalam peraturan-peraturan seperti perda, SK, yang disertai dengan *job description* yang jelas. Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan optimal, maka dibutuhkan panduan-panduan operasionalnya.

5. Rencana Tanggap Darurat

Rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan, dan penyelamatan agar korban dapat diminimalkan. Upaya ini sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan hari-hari pertama setelah bencana sebelum bantuan dari pihak luar datang.

6. Sistem Peringatan Dini

Penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu, melalui institusi yang telah diidentifikasi, dan memungkinkan individu yang terancam bahaya agar mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan bersiap-siap untuk menanggapi secara efektif. (Terminologi UN/ISDR).

7. Mobilisasi Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia, baik SDM, maupun pendanaan dan sarana-prasarana penting untuk keadaan darurat merupakan potensi yang dapat mendukung atau sebaliknya menjadi kendala dalam kesiapsiagaan bencana alam. Karena itu mobilisasi sumber daya menjadi faktor yang krusial.